Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pendidikan Untuk Menyiasati Masalah Multikultur Di Indonesia & Malaysia

Firdaus¹, Faishal Yasin² & Dian Kurnia Anggreta³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)

PGRI Sumatera Barat, INDONESIA

daus_gila@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang sama-sama menghadapi dilema multikultur. Sebagai negara bangsa yang dibangun atas keberagaman, dua negara ini menjadi bangsa multikultural. Dampaknya, berbagai konflik karena perbedaan –etnis, agama, ras, adat, bahasa dan sebagainya- yang tidak dikelola dengan baik tidak terhindarkan di kedua negara. Gesekan karena perbedaan telah menjadi pemicu munculnya konflik karena satu sama lain tidak saling memahami dan menghormati. Ketidadaan saling memahami dan menghormati kerap muncul karena paham *antroposentris* yang disebabkan oleh minimnya pengenalan terhadap kebudayaan di luar kebudayaan sendiri. Oleh karenanya, pengenalan kebudayaan di luar kebudayaan sendiri sangat penting dilakukan sejak dini kepada pemangku kebudayaan melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal. Proses ini kemudian dikenal dengan pendidikan multikulturalisme. Banyak studi yang membahas tentang pendidikan multikultural, namun belum banyak studi yang membahas tentang penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui pendidikan. Artikel ini ditulis melalui penelitian normatif melalui penelusuran literatur seperti buku, jurnal, makalah, artikel dan berita media. Dalam artikel ini ditawarkan penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui pendidikan formal seperti sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah dan pendidikan informal melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pendidikan, Keberagaman, Multikulturalisme, Pendidikan Multikulturalisme.

PENGENALAN

Artikel ini mengkaji tentang penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui pendidikan formal dan informal. Dalam *ASEAN Comparative Education Research Network Conference 2015* ini, artikel masuk dalam tema pendidikan untuk kelestarian etnik dan budaya. Oleh karenanya, uraian dan kajian dalam artikel ini memperbincangkan tentang peran yang bisa diambil pendidikan untuk kelestarian etnik dan budaya yang ada pada masyarakat multikultur. Lebih spesifik, artikel ini mendiskusikan penanaman nilai-nilai multikulturalisme sebagai sebuah paham, ideologi dan nilai melalui pendidikan.

LATAR BELAKANG

Permasalahan yang muncul karena keberagaman (suku, agama, ras, adat dan sebagainya) telah menjadi fakta inheren dalam berbagai negara yang dibangun di atas keberagaman itu. Sebut saja diskriminasi etnis di Amerika dan Australia, ketegangan etnis di Kanada, Inggris, Afrika dan berbagai masalah keberagaman lainnya di berbagai negara di belahan dunia. Tidak ayal, mayoritas negara yang dibangun dari berbagai suku bangsa atau dikenal dengan negara bangsa akan menghadapi masalah yang sama, yaitu persoalan silang budaya antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Perselisihan kerap muncul karena satu suku bangsa tidak memahami suku bangsa lain, dan/atau bahkan tidak menghargainya. Selanjutnya, masalah yang ada terus bereskalasi terutama ketika ditarik ke wilayah ekonomi dan/atau politik. Sudah menjadi rahasia umum, konflik antar suku bangsa kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Akibatnya, perselisihan terus berkelanjutan dan sengaja disetting untuk tidak selesai demi kepentingan itu.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menghadapi masalah silang budaya karena keduanya merupakan negara yang dibangun di atas berbagai suku bangsa yang berbeda. Bahkan, suku bangsa yang ada di kedua negara ini berasal dari berbagai negara. Ketegangan antara suku bangsa yang muncul karena perbedaan yang tidak dikelola dengan baik menjadi kenyataan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh masyarakat dan pemerintah. Setidaknya Malaysia pernah disapu gelombang kekerasan etnis yang sengit dalam tahun-tahun sesudah perang dunia II dan kemudian pada tahun 1969. Singapura yang didominasi oleh keturunan Cina menyaksikan kerusuhan-kerusuhan etnis pada tahun 1964 dan pada 1965 dipaksa keluar dari federasinya yang sudah berusia dua tahun dari Malaysia setelah terjadinya perselisihan mengenai hak warga negara keturunan Melayu dan Cina (Hefner, 20). Indonesia juga menyaksikan kekerasan komunal pada akhir 1950-an dan 1965, yang lebih mengguncangkan lagi, Indonesia diguncang oleh kekerasan etnoreligius pada tahun 1996 sampai 2001 yang anatra lain terjadi di Ambon, Poso, Sampit dan Sambas (Hefner, 2007 & Klinken 2007).

Sampai hari ini, masalah etnisitas dan keberagaman masih menjadi persoalan bagi negara bangsa yang dibangun berdasarkan keberagaman etnis, atau dalam bahasa Furnivall dikenal dengan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk menurut Furnivall adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 2000 & Budiman, 2012). Di Indonesia, segregasi etnis masih terjadi di Bukittinggi (Viri, 2012), konflik antar etnis Cina dan Jawa di Lamongan Jawa Timur, konflik etnik antara penduduk asli Lampung dengan Etnik Jawa yang dikenal dengan konflik bungkok dan konflik Kebondamar yang melibatkan etnik Lampung dengan etnik Jawa dan Bali pada tahun 2003 (Hartoyo, 2004), konflik antara islam dan kristen di di Mataram (Hakim, 2003) dan banyak kasus konflik keberagaman lainnya. Di Malaysia, warga (tidak semuanya) masih cenderung memiliki sifat

diskriminatif yang kemungkinan telah terpupuk sejak dini. Bukan melulu karena kebanggaan terhadap etnis masing-masing saja, namun sering kali bahkan menjurus ke sesuatu yang cenderung negatif (Endrawan, 2013). Terakhir, pasca gelombang protes di Malaysia gelombang politik etnik disinyalir kembali menguat seperti disampaikan oleh Ibrahim Suffian, direktur Merdeka Center, lembaga survei independen bahwa Pemilu mendatang akan berdasarkan politik ras (Merdeka.com, 2015).

Secara sosio-psikologis masalah ketegangan etnis yang melahirkan ketagangan dan konflik diidentifikasi sebagai dampak dari ketidaksiapan suatu pemangku kebudayaan berinteraksi dengan pemangku kebudayaan lain di sekitar mereka. Konflik bisa saja bermula dari individu penganut kebudayaan tertentu yang kemudian ditarik ke wilayah komunal di kelompok individu yang berkonflik. Akibatnya, masalah individu kemudian menjadi masalah komunal. Kondisi ini akan lebih buruk ketika tokoh pemangku kebudayaan tidak mampu memahami masalah secara utuh, sehingga sentimen emosional dan komunalitas menjadi pemicu konflik antar kelompok pemangku kebudayaan. Parahnya, konflik yang mulai tumbuh kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan, muaranya konflik terus bereskalasi ke bentuk yang lain. Studi Klinken di Sambas, Kalimantan yang bermula dari konflik penduduk asli suku Dayak dengan penduduk pendatang dari Madura menunjukkan bahwa Faktor kontekstual kunci bagi kekerasan komunal tidak bersifat ekonomis, melainkan politis (Klinken, 2007: 44).

Secara sosio-antropologis, permasalahan keberagaman kerap diidentifikasi karena sikap etnosentris dan antroposentris yang dimiliki oleh pemangku kebudayaan tertentu. Sikap ini kemudian mengakibatkan paradigma yang buruk terhadap pemangku kebudayaan lain yang memiliki perbedaan. Dalam artian penganut kebudayaan tertentu memandang kebudayaan di luar diri mereka sebagai tidak baik, jelek, buruk, terbelakang dan sebagainya. Dengan pandangan seperti itu kemudian mereka beranggapan bahwa kebudayaan orang lain tidak sebanding dengan mereka. Dalam upaya membendung berkembangnya faham etnosentris dan antroposentris ini kemudian di negara-negara berbasis multietnik muncul faham multikulturalisme sebagai sebuah faham, ideologi dan nilai baru dalam menghormati kebudayaan luar.

Multikultural Dan Multikulturalisme

Banyak tulisan yang membahas tentang multikultural dan multikulturalisme sejak konsep ini muncul dan diperkenalkan. Terutama setelah negara-negara Eropa dan Amerika memperbincangkan dan menggunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan persoalan keberagaman di negaranya mereka. Tidak terkecuali itu, di Indonesia dan Malaysia juga muncul tulisan-tulisan yang membahas tentang multikultural dan multikulturalisme. Namun, banyak tulisan kurang ketat dalam membedakan antara multikultural sebagai konsep/wacana dan multikulturalisme sebagai sebuah faham, ideologi atau nilai. Untuk menghindari kerancuan kedua

konsep ini agar tidak terjebak pada ketiadaan pembatasan yang tajam antara keduanya, akan diuraikan kedua konsep ini dalam pembahasan khusus ini.

Konsep multikultural secara bahasa berakar dari kata *culture* atau kebudayaan. Oleh Koentjaraningrat Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan definisi ini, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya amat sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar, bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh makhluk manusia dalam gen-nya bersama kelahiran, juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan (Koentjaraningrat, 1990:180). Kata "multi" berasal dari bahasa latin '*multus*' yang dalam bahasa Inggris berarti *much* atau *many*. Much atau many dalam bahasa Indonesia/Melayubisa berarti jamak atau banyak. Dengan demikian, multikultur dapat difahami sebagai banyak kebudayaan. Meskipun demikian, dalam kepentingan penulisan hal ini multikultural diartikan sebagai suatu situasi dimana terdapat banyak kebudayaan yang dianut oleh masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas, konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru muncul sekitar tahun 1970-an. Gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Australia. Kemunculan multikultural di Kanada dilatari oleh kondisi kenegaraan Kanada yang didera konflik yang disebabkan oleh hubungan antar warga negara. Masalah tersebut meliputi hubungan antar suku bangsa, agama, ras dan aliran politik yang terjebak pada dominan dan tidak dominan. Konflik tersebut kemudian mampu diselesaikan dengan digagasnya konsep masyarakat multikultural yang esensinya adalah kesetaraan, menghargai hak budaya komunitas dan demokrasi (Wahyu, 2004 dalam Firdaus, 2006:4).

Selain konsep multikultural, juga dikenal konsep multikulturalisme. Multikulturalisme menurut Suparlan juga berakar dari kebudayaan. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Oleh karenanya, ulasan tentang multikulturalisme harus juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, Hak Asasi Manusia (HAM), hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002). Sebagai sebuah faham atau ideologi, multikulturalisme bukan lagi sebuah konsep, namun terdapat padanya nilai-nilai yang bisa dianut.

Dengan mengacu pada uraian dan penjelasan di atas, maka penggunaan konsep dalam penulisan ini dibedakan antara multikultural dan multikulturalisme. Konsep multikultural digunakan untuk menggambarkan situasi keberagaman budaya, adat, hukum, ras, agama dan sebagainya di dalam suatu negara bangsa.

Kemudian, multikulturalisme dalam penulisan ini merupakan sebuah faham, ideologi dan nilai. Sebagai sebuah nilai, dalam hal ini penulis mengacu kepada apa yang diuraikan secara panjang lebar oleh Suparlan yang pada intinya adalah bahwa Multikulturalisme adalah faham, ideologi dan nilai yang menempatkan semua kebudayaan pada posisi yang sederajat. Dalam hemat penulis, nilai ini berakar dari faham ralatifisme budaya dalam antropologi dimana suatu kebudayaan dilihat dan difahami berdasarkan sudut pandang pemilik kebudayaan tersebut, bukan berdasarkan sudut pandang orang luar.

TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN

Berdasarkan uraian dan tinjauan konsep yang telah dibentangkan di atas, penulisan artikel ini bertujuan untuk :

1. Menguraikan tentang kondisi dan permasalahan multikultural yang terjadi dan dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia.
2. Menguraikan penanaman nilai-nilai multikulturalisme melalui pendidikan untuk menyiasati masalah multikultur di kedua negara.

Dengan menetapkan tujuan dan objektif kajian ini maka pembahasan dalam artikel ini terbatas pada uraian dua tujuan penulisan di atas.

METODOLOGI

Makalah ini adalah hasil pemikiran yang dilahirkan dengan penelusuran pustaka (penelitian normatif). Data yang disajikan dalam artikel ini diperoleh dari penelusuran bacaan berupa buku, jurnal, laporan penelitian, berita media dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Dalam penulisan artikel hasil pemikiran, secara metodologis hal ini dimungkinkan. Data yang didapatkan dalam penelusuran kemudian disajikan secara naratif deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan tujuan penulisan.

KONDISI DAN PERMASALAHAN MULTIKULTUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, dimana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, mempunyai bahasa dan kebudayaan tersendiri. Oleh karena itu, suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa bukanlah negara bangsa, melainkan nagara multibangsa dan kebudayaan terkecil membantuk "minoritas bangsa" (Kymlika, 2002:14). Keragaman budaya yang dibentuk oleh berbagai suku bangsa –terutama negara dengan etnis mayorits-minoritas seperti Indonesia dan Malaysia- yang tidak dikelola secara baik melahirkan masalah silang budaya yang bermuara pada ketegangan antar pemangku kebudayaan.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia telah menjadi fakta bahwa keberagaman etnis, agama, bahasa, adat, budaya dan sebagainya di dua negara ini telah menjadikan keduanya sebagai negara bangsa yang rawan dan rentan dengan ketegangan etnik. Secara historis, ketegangan –terutama antar etnis dan agama- di dua negara ini sudah berlangsung sejak lama. Akar ketegangan yang disebabkan oleh keberagaman tersebut paling tidak dapat ditelusuri semenjak era kolonial di kedua negara, meskipun dua negara ini dijajah oleh negara kolonial yang berbeda dan dalam waktu yang juga berbeda.

Di Indonesia struktur masyarakatnya ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan (Nasikun, 2002:28). Hildred Geertz (1981) mencatat terdapat 300 suku bangsa dengan lebih dari 200 bahasa yang digunakan di Indonesia. Van Valenhoven pernah mengklasifikasikan aneka warna suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan sistem lingkaran-lingkaran hukum adat ke dalam 19 daerah lingkaran hukum adat (Koentjaraningrat, 1990:301). Terbaru, sensus BPS tahun 2010 mencatat bahwa di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa (BPS, 2010). Selain etnis dan hukum adat, Indonesia juga mengakui 6 agama resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu). Di samping agama yang diakui, terdapat ratusan kepercayaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia.

Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Oleh Furnivall masyarakat majemuk Indonesia disebut sebagai tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas, kendati jumlahnya semakin bertambah-tambah pada akhir abad ke-19, sekaligus adalah penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang timur asing lainnya menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas (Nasikun, 2000:28-29, Budiman, 2012:467).

Di Malaysia, Keberagaman menurut Embong disebabkan oleh migrasi, khususnya migrasi transnasional selama era penjajahan dan dalam dekade-dekade terakhir ini, menjadi salah satu faktor utama dalam penciptaan pluralisme (keberagaman *pen*) modern di Malaysia. Pluralisme di Malaysia dalam semua dimensinya –etnis, linguistik, religius, kultural dan lain sebagainya- terutama dibentuk di masa penjajahan, sekalipun ia juga memiliki akar-akar dalam dalam periode pra kolonial (Embong, 2007: 106). Lebih lanjut, struktur masyarakat Malaysia oleh Hefner digambarkan sebagai dirangsang oleh pemerintah kolonial untuk bersaing segitiga antara para bangsawan, islami dan nasionalis populer. Tetapi di akhir masa penjajahan, ketiganya ragu-ragu manakah di antara arus-arus

budaya itu yang seharusnya dominan. Keluarga raja dan bangsawan menguasai pos-pos kepemimpinan puncak dalam organisasi-organisasi politik melayu. Dalam periode setelah Perang Dunia II, mereka menguasai pos-pos kunci di UMNO, sebuah partai yang memimpin koalisi yang telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan. Kewarganegaraan yang berkembang di Malaysia adalah kewarganegaraan yang dibeda-bedakan secara asimetris, yang memberikan hak-hak dasar warga negara kepada orang-orang Cina dan India dengan imbalan hak-hak istimewa dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi pada orang-orang Melayu. Islam dinyatakan sebagai agama negara, bahasa Melayu dinyatakan sebagai bahasa nasional (Hefner, 2007:56).

Tidak ayal, kedua negara ini kini masih menghadapi masalah dalam mengelola keberagamannya. Bahkan di Indonesia, permasalahan mengenai keragaman (Agama, Budaya, Adat, Bahasa dan sebagainya) telah ada sejak awal sejarahnya. Sesuai dengan dinamika sosial politik dari suatu periode sejarah ke periode lain, masalah-masalah terkait keberagaman itu mengambil bentuk yang berbeda-beda (Bagir, 2011:12). Di Malaysia, selama puluhan tahun masalah pluralisme telah membuat para pejabat dan, cendekiawan dan pemain pasar Malaysia terlibat perdebatan-perdebatan dan tawar-menawar kebijaksanaan, kadang-kadang secara terbuka dan di saat-saat lain terselubung. Seringkali wacana-wacana tingkat elit, khususnya di antara para pemimpin politik yang saling bertarung, yang menjadi sangat menonjol, misalnya sebagaimana terjadi secara teratur di masa-masa pemilu. Ini bisa menyebabkan ketegangan-ketegangan antar-etnis di tingkat akar rumput, sebagaimana secara tragis diilustrasikan oleh huru-hara etnis 1969 (Embong, 2007:107)

Dengan mengacu pada sejarah ketegangan antar etnis di kedua negara ini, dapat ditarik satu benang merah bahwa kepentingan ekonomi dan politik menjadi dominan disamping faktor ideologis yang menjadi pemantik. Ketegangan yang terus dipelihara kemudian melahirkan suatu paradigma yang tidak serasi antara satu golongan dengan golongan lainnya dalam memahami perbedaan. Sikap etnosentris kerap muncul dalam menilai dan melihat budaya lain di luar budaya sendiri. Ketidadaan nilai dalam memahami perbedaan yang terlihat secara kasat mata melahirkan dan menguatkan berbagai konflik yang telah ada di tengah masyarakat. Implikasinya kemudian, konflik antar etnis menjadi problem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menciptakan *good governance*.

Secara logis, jika ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan etnis tidak diatasi dengan seksama dan dengan pendekatan kultural sebagai akar konflik, tentu konflik yang terjadi akan berbanding lurus dengan jumlah suku bangsa, ras, bahasa, agama, kepercayaan dan kelompok-kelompok yang ada. Dalam hal ini, secara teoritis konflik baik latent maupun manifest terdiri dari dua tingkatan, yaitu konflik yang bersifat ideologis dan konflik yang bersifat politis. Konflik secara ideologis muncul sebagai akibat pertentangan ideologi yang menjadi paham dan anutan suatu masyarakat dan golongan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian konflik politis muncul atas ketimpangan-ketimpangan kepentingan

antara satu kelompok kepentingan dengan kelompok kepentingan lainnya pada wilayah praktis

Mempelajari konflik multikultur yang ada =yang terjadi di kedua negara beberapa dekade terakhir, konflik lebih banyak dipicu oleh konflik lama yang bersifat ideologis yang kemudian dipelintir untuk kepentingan politis golongan tertentu, sehingga konflik ideologis beralih ke wilayah konflik politis. Tidak dapat disangkal bahwa perbedan agama, suku, ras menjadi persoalan laten yang banyak memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat yang plural, oleh karenanya perlu mengantisipasi dengan penanaman nilai yang mampu menempatkan perbedaan pada kesederaajatan. Caranya adalah melalaui pendidikan. Pendidikan dalam hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme pada setiap individu, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Nilai-nilai yang menempatkan perbedaan dalam kesetaraan tersebut adalah nilai-nilai multikulturalisme.

PENANAMAN NILAI-NILAIMULTIKULTURALISME MELALUI PENDIDIKAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman telah menjadi pemantik berbagai ketegangan dan konflik dalam masyarakat multikultur. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ideologis, ekonomi dan bahkan politik. Meskipun persoalan multikultural di Indonesia dan Malaysia sudah berakar sejak masa penjajahan dan kini kuat dipengaruhi oleh faktor politis, penulis dalam hal ini meyakini bahwa penanaman nilai-nilai multikulturalisme dengan menempatkan semua suku bangsa, budaya, agama, ras, bahasa, hukum adat pada posisi yang sederajat dapat menjadi alternatif dalam menyiasati keberagaman itu. Salah satu cara menanamkan nilai tersebut adalah melalaui pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin cerdas serta berbudi pekerti luhur. Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuannya, nilai dan sikapnya serta keterampilannya (Sadulloh, 2009:57). Lebih luas, pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri berkepribadian dan berakhlak mulia serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Amirin, 2012:2).

Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang penanaman nilai multikulturalisme, perlu menyinggung sedikit tentang pendidikan multikultural yang sudah sejak lama berkembang di negara Barat yang di mulai di Amerika. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara keduanya. Pendidikan multikultural pertama-tama mencuat di Amerika Serikat tahun 1960-an. Hal ini merupakan gerakan reformis yang ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat 'minoritas' yaitu masyarakat yang berada di luar "*white-male-protestant-anglo saxon (WMPA)*". Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Banks "*multicultural education is a reform designed*

to make same major change in education of students. Multicultural education theorists and researcher believe that many school, college and university practices related to race and ethnicity are harmful to students and reinforce many of the ethnic stereotype and discriminatory practices in U.S. Society" (Amirin, 2012, Suparmi, 2012). Secara teknis, Banks menyebutkan Pendidikan Multikultural terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1) ide atau konsep, 2) gerakan reformasi pendidikan dan 3) (Suparmi, 2012).

Dengan mengacu pada apa yang sudah dibentangkan di atas, maka pendidikan multikultural dapat difahami sebagai sebuah sistem pendidikan dimana pola dan sistem pembelajaran memberikan ruang yang sama bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi. Hal ini bisa dilihat dalam diskursus tentang pendidikan multikultural yang banyak ditulis di Indonesia dan Malaysia sejak pertengahan tahun 1990-an hingga hari ini. Lalu, bagaimana dengan penanaman nilai-nilai multikulturalisme? Apakah sama dengan pendidikan multikultural? Perbincangan di bawah ini akan menguraikan tentang penanaman nilai-nilai tersebut melalui pendidikan.

Penanaman nilai-nilai multikulturalisme bukanlah sistem pendidikan itu sendiri, namun proses yang penanaman atau transformasi nilai melalui proses pendidikan formal maupun non formal, karena pendidikan adalah penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dengan menggunakan pranata-pranata seperti sekolah-sekolah yang disengaja diciptakan untuk tujuan tersebut (Manan, 1989:9). Hal ini mengacu pada pandangan bahwa pendidikan (Syah, dalam Chandra 2009: 33) berasal dari kata dasar "didik" yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan. Kedua hal tersebut memerlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan tentang kecerdasan pikiran. Dengan demikian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan melihat definisi tersebut, sebagian orang mengartikan bahwa pendidikan adalah pengajaran karena pendidikan pada umumnya membutuhkan pengajaran dan setiap orang berkewajiban mendidik dan melakukan penanam nilai kepada orang lain. Penanaman nilai bisa dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal agar manusia bisa saling menghargai sesama manusia (etnik) yang negara (bangsa) memiliki masyarakatnya yang plural. Dalam hal ini penanaman nilai multikulturalisme melalui pendidikan diartikan sebagai kegiatan penanaman nilai untuk mengubah sikap dan perilaku manusia dari pola pikir, sikap dan perilaku yang menganggap sukunya yang paling benar (*etnosentrisme*) menjadi pola pikir, sikap dan perilaku yang menempatkan semua suku bangsa, agama, adat dan sebagainya pada posisi yang sederajat, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk.

Penanaman nilai multikulturalisme dapat dilakukan terhadap 3 ranah pendidikan, yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. Sikap (*afektive*) adalah upaya untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan tentang kultural (budaya), toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif

terhadap budaya lain, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Kognitif (*cognitive*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan psikomotorik (*psycomotoric*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran dengan memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, dan menjelaskan dinamika kultural (Saha, 1997: 349).

Dalam proses penanaman nilai multikulturalisme, pendidikan formal mempunyai pengaruh yang sangat besar karena menurut Manan (1989:11) tugas utama pendidikan adalah untuk mengekalkan hasil prestasi kebudayaan, pendidikan pada dasarnya bersifat konservatif. Namun sejauh pendidikan mempersiapkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kejadian-kejadian yang dapat diantisipasi didalam dan diluar kebudayaan, pendidikan telah merintis untuk perubahan kebudayaan. Pendidikan formal juga diatur dalam sebuah kurikulum, dalam pengembangan kurikulum masyarakat juga sebagai salah satu indikator dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kenapa masyarakat menjadi sebuah indikator? Sebab yang menjalankan kurikulum dan melaksanakan pendidikan adalah masyarakat itu sendiri, pada bangsa yang masyarakatnya plural, penting sekali penanaman nilai multikulturalisme di dalam sistem pendidikan. Dalam pendidikan formal penanaman nilai multikulturalisme bisa berupa dengan menunjukkan sikap dengan memperlakukan semua anak sama dalam kegiatan proses pembelajaran, baik diluar kelas maupun di dalam kelas, perlakuan yang sama dalam melibatkan anak dalam semua kesempatan dalam bentuk aktifitas pendidikan dan diluar pendidikan. Dengan demikian kepribadian yang menilai semua keberagaman adalah pada posisi yang setara akan terbentuk.

Melalui pendidikan formal, penanaman nilai multikulturalisme dapat dimasukkan ke dalam materi-materi pelajaran tentang multikulturalisme yang menguraikan berbagai hal yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas dengan menggunakan pendekatan humanist. Pendekatan humanist dimaksudkan adalah proses memanusiakan manusia menurut konsep Paulo Freire (Ende 2011:3). Pendekatan yang dilakukan tidak dalam bentuk merubah sistem melainkan melalui pendekatan individual kepada individu seperti siswa, pemuda, orang tua dan sebagainya yang diharapkan menjadi jembatan untuk mengembangkannya pada orang lain. Dalam pendekatan humanist, individu tersebut diharapkan bisa mengembangkan kreatifitas agar bisa tetap bisa bertahan dalam hidupnya. Oleh karena itu daya kritis dan partisipatif dalam harus muncul dalam jiwa individu. Pada pendidikan formal diharapkan siswa di sekolah/madrasah setelah mendapatkan materi pembelajaran bisa

memiliki pengetahuan, sikap dan psikomotorik. Pelajar mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk keberagaman, menyikapi keberagaman, dan memperlakukan keragaman sesuai dengan nilai-nilai multikulturalisme. Selama proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal semua perangkat pembelajaran mengacu pada nilai-nilai multikulturalisme, seperti sikap saling menghargai dan menempatkan semua orang dengan latar belakang berbeda dalam kesetaraan.

Dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal setiap mata pelajaran juga menyisipkan nilai-nilai multikulturalisme baik didalam metode maupun strategi pembelajaran dengan pendekatan humanist. Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran dengan metode yang beragam, seperti ceramah, simulasi, bermain peran, observasi, dan terjun kelapangan (Aly, 2003: 70). Contohnya pendidik menjelaskan dan mendiskusikan keanekaragaman budaya mulai suku lokal hingga suku yang lain yang hidup bersama didalam masyarakat multikultur. Selain itu, pendidik menginformasikan kepada individu bahwa semua orang dari etnis mana pun juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain, ini menggambarkan sikap toleran dan saling menghargai suku yang menghasilkan karya lokal dengan menggunakan media pembelajaran. Sementara itu, melalui simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki peran agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Guru meminta siswa membentuk kepanitiaan bersama dalam menjalankan proyek yang diberikan guru, yang di dalam kepanitiaan tersebut siswa terdiri dari berbagai agama, suku, ras dan budaya. Sedangkan observasi dan penanganan kasus, siswa diminta menganalisis nilai-nilai multikulturalisme yang ada dimasyarakat. Dan di dalam perangkat pembelajaran guru mempersiapkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai multikulturalisme didalam lingkungan keluarga dan tempat dimana mereka tinggal.

Selain melalui pendidikan formal, penanaman nilai-nilai multikulturalisme bisa dilakukan melalui sikap dan perilaku dalam pergaulan sehari-hari didalam lingkungan sosial atau dalam istilah lain disebut pendidikan informal. Dalam prakteknya bisa dilakukan dengan membentuk kelompok (*peer group*), anak dalam lingkungan keluarga dan adat. Sifat anak yang masih memakai pola meniru (imitasi), dapat dimanfaatkan dalam pembentukan kepribadian anak dengan menirukan perilaku yang menunjukkan sikap menempatkan semua kebudayaan ada;lah sederajat. Hal ini akan menjadikan anak meniru apa yang diperlihatkan. Apabila proses penanaman nilai multikultural berlangsung pada setiap aktifitas anak, diharapkan anak bisa menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme.

Lembaga adat dan lembaga agama juga dapat dimanfaatkan dalam penanaman nilai-nilai multikulturalisme. Dalam hal ini aktor dalam lembaga adat dan agama perlu memiliki pemahaman dan pandangan bahwa semua kebudayaan adalah sederajat. Hampir setiap agama diajarkan untuk hidup saling berdampingan tanpa memandang kaum minoritas, oleh karenanya lembaga agama mesti memainkan peran dalam penanaman nilai multikulturalisme di lingkungan mereka.

Tokoh agama –ustadz, kiyai, pastor, biksu dan sebagainya- dan tokoh adat bisa menjadi aktor utama dalam lembaga agama yang menanamkan nilai-nilai multikulturalisme kepada masyarakatnya.

KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman adalah potensi sekaligus ancaman bagi negara multikultur seperti Indonesia dan Malaysia. Sebagai potensi, keberagaman tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan negara bangsa. Sebagai ancaman, ia akan menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. Sejauh ini, pengelolaan keberagaman di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya masalah karena tidak dikelola dengan baik. Secara vertikal, masalah tersebut lahir karena kebijakan politik penyelenggara negara. Secara horizontal, masalah muncul karena sikap dan perilaku pemangku kebudayaan tidak dapat menghormati dan menghargai kebudayaan lain. Untuk menyelesaikan dua sumber masalah ini, penanaman nilai-nilai multikultural melalui pendidikan adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan terutama masalah horizontal. Untuk masalah yang muncul dari pemerintah, hal ini adalah dalam jangka panjang. Artinya, individu yang dalam diri mereka sudah tertanam nilai-nilai multikulturalisme akan berkesempatan pada masa yang akan datang dalam struktur pemerintahan. Oleh karenanya, penanaman nilai dianggap penting dan jalannya adalah melalui pendidikan.

RUJUKAN

- Abdullah, Aly, 2003. *Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia*. Jurnal, Volume II Nomor 1, Januari-Juli 2003.
- Amirin, Tatang M, 2012. *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Pendidikan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 1-16.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk, (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Kewargaan di Indonesia*. Mizan & CRCS, Jogjakarta.
- Budiman, Hikmat, 2012. *Mendiskusikan Kembali Farnival: Satu Lagi Cerita dari Bagansiapiapi*. Ed. Hikmat Budiman, Hal. 459-508. The Interseksi Foundation (Yayasan Interseksi), Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta, 2003.
- Endrawan, Baskoro, 2013. *Malaysia: Catatan Diskriminasi Di Negara Multikultural*. http://www.kompasiana.com/baskoro_endrawan/malaysia-catatan-diskriminasi-di-negara-multikultural_552a598ff17e613579d624d5 diunduh 14 September 2015.
- Embong, Abdur Rahman, 2007. *Budaya dan Praktek Pluralisme di Malaysia Pasca Kolonial*. Ed. Robert W. Hefner, Hal. 105-146. Kanisius, Jogjakarta.

- Firdaus, 2006. *Pendidikan Multikultural Untuk Menta Kehidupan Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Jurnal Sigai Vol. VII, No. 11, April 2006 hal 1-16.
- Habib, Achmad. *Konflik Antar Etnik di Pedesaan; Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Hefner, Robert W., 2007. *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius, Jogjakarta.
- Klinken, Gerry Van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kymlicka, Will, 2002. *Kewargaan Multikultural; Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Manan, Imran 1989. *Antropologi Pendidikan Suatu Pengantar*. Dirjen DIKTI, Jakarta
- Nasikun, 2000. *Sistem Sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Rini, YuliSectio, TT. *Pendidikan: Hakekat, Tujuan dan Proses*. Makalah.
- Sadulloh, Uyoh, 2008. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Lafabeta, Bandung.
- Sanusi, Uci, 2013. *Pembelajaran Dengan Pendekatan Humanistik (Penelitian Pada MTs Begeri Model Cigugur Kuningan)*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 11 No. 2, 2013 hal 123-142.
- Suparlan, Parsudi, 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Jurnal Antrpologi Indonesia 69, 2002, Hal. 98-105.
- _____. *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*. Jurnal Antrpologi Indonesia 72, 2003, Hal. 24-37.
- Suparmi, 2012. *Pembelajaran Kooperatif Dalam Pendidikan Multikultural*. Jurnal Pembangunan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012. Hal. 108 – 118
- Viri, Kristina, 2012. *Pengelompokan Pemukiman Warga Berdasarkan Etnis dan Agama di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat*. Ed. Hikmat Budiman, Hal. 191-260. The Interseksi Foundation (Yayasan Interseksi), Jakarta.
- <http://www.merdeka.com/dunia/pemilu-kian-mempertegas-konflik-etnis-di-malaysia.html>. diakses 14 September 2015